

# **PENGARUH ALOKASI BELANJA BIDANG INFRASTRUKTUR EKONOMI, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT**

**Oleh : Gusti Ayu Evy Restianty**

## **ABSTRACT**

*Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi yaitu Dak Infrastruktur ekonomi, Dak Infrastruktur pendidikan dan Dak Infrastruktur kesehatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja bidang infrastruktur ekonomi kesehatan dan pendidikan bersumber dari dana perimbangan terhadap indek pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2010-2019. Teknik analisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi berpengaruh terhadap IPM, DAK Infrastruktur Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM dan DAK Infrastruktur Pendidikan berpengaruh terhadap IPM*

*Kata Kunci : DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Pendidikan, DAK Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Indonesia secara administratif terbagi menjadi 34 provinsi, dimana angka IPM Ibu Kota Jakarta menempati peringkat pertama dari tahun 2010-2018 menunjukkan angka yang tertinggi dalam kurun waktu tersebut dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya di Indonesia. Kalimantan Barat secara administratif terbagi menjadi 14 Kabupaten/Kota, dengan jumlah 14 Kabupaten/Kota tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi, dimana angka IPM Kota Pontianak menempati peringkat pertama dari tahun 2010-2018 menunjukkan angka yang tertinggi dalam kurun waktu tersebut dibandingkan dengan 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Dengan melihat kenyataan angka IPM di Kalimantan Barat maka peran dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah menjadi semakin penting, karena dituntut harus mampu untuk melakukan fungsi alokasi atas seluruh sumber daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh

kebutuhan pelayanan publik sehingga sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia.

Keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah masih menjadi persoalan yang menghambat proses peningkatan Indeks pembangunan Manusia. Infrastruktur dapat dibedakan dalam dunia jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan jenis infrastruktur yang secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa infrastruktur fisik, yang digunakan dalam proses produksi serat yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan dana DAK infrastruktur ekonomi yang meliputi pembangunan jalan dan pembangunan pasar di per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum, berupa tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Adapun infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan secara lebih merata, diharapkan tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah. Tentunya, hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu pentingnya pemerintah daerah se kalimantan Barat untuk mengelola Dana Perimbangan untuk diperuntukkan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang akan berdampak pada percepatan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Penulis memilih judul "**Pengaruh Alokasi Belanja Bidang Infrastruktur Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Bersumber Dari Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Barat**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1. Pernyataan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Alokasi Belanja Bidang Infrastruktur Ekonomi Kesehatan dan Pendidikan Bersumber Dari Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Barat”

## **2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Apakah DAK Infrastruktur Ekonomi berpengaruh terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah DAK Infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah DAK Infrastruktur pendidikan berpengaruh terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAK Infrastruktur Ekonomi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAK Infrastruktur kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAK Infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah peningkatan indeks pembangunan manusia dengan dukungan dana perimbangan guna percepatan pembangunan infrastruktur dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan dukungan dana perimbangan guna percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.2.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah adalah negara maju, berkembang atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Konsep IPM mengukur pencapaian rata-rata kemajuan sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia (Kuncoro, 2004) :

- 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran;
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas bobot satu per tiga (*gross enrollment ratio*).
- 3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan oleh PBB berdasarkan penilaian diatas. Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu IPM atau Human Development Index (HDI).

### 2.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu pengertian Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dilalokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

- b. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota
- c. kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten / kota.
- d. Jika penentuan Proporsi tersebut belum dapat di hitung

Secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan dengan imbalan 10% dan 90%. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Prakosa, 2004). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2006).

### **2.2.3 Infrastruktur**

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1998). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1998). Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Infrastruktur meliputi fasilitas umum ialah jalan lokal, saluran drainase, pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, persampahan, listrik dan telepon.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Bentuk Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang diartikan sebagai suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Siswanto (2012): “Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian”. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **A. Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.

#### **B. Waktu Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini mulai dari penentuan lokasi hingga pelaporan yaitu mulai dari September 2019 sampai Juli 2020.

### **3.3 Data Penelitian**

Pada penelitian ini data yang digunakan dalam studi ini ditujukan untuk mendapatkan data data sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan diuraikan berikut ini :

#### **a. Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, hasil penelitian, dan data-data yang dikumpulkan yang berasal dari BPS Kalimantan Barat.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisa data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data. Analisis, data merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian.

#### **1) Uji Asumsi Klasik**

##### **a) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Normal atau tidaknya data dapat dilihat dari tingkat *Asymp.Sig.(2-tailed)* dimana apabila kurang dari 0,05 menandakan distribusi tidak normal (Priyatno, 2011).

##### **b) Uji Linearitas**

Uji *Linearitas* dilakukan dengan mencari persamaan regresi variabel bebas x terhadap variabel terikat y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta linearitasnya. Sebuah persamaan regresi dikatakan linearitas bila nilai sig linearity  $<0,05$ . (Priyatno, 2011).

## 2) Uji Regresi Berganda

Persamaan regresi berganda :  $Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Dimana

Y = Variabel terikat (Indek Pembangunan Manusia)

X1= Variabel intervening (DAK Infrastruktur Ekonomi)

X2= Variabel intervening (DAK Infrastruktur Kesehatan)

X3= Variabel intervening (DAK Infrastruktur Pendidikan)

$\beta_1 \dots \beta_3$  = Koefisien (parameter taksiran)

Kemudian dilakukan Ln sehingga persamaan menjadi

Persamaan regresi berganda :  $\ln Y = \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e$

Dimana

$\ln Y$  = Variabel terikat (Indek Pembangunan Manusia)

$\ln X_1$  = Variabel intervening (DAK Infrastruktur Ekonomi)

$\ln X_2$  = Variabel intervening (DAK Infrastruktur Kesehatan)

$\ln X_3$  = Variabel intervening (DAK Infrastruktur Pendidikan)

$\ln \beta_1 \dots \ln \beta_3$  = Koefisien (parameter taksiran)

## 3) Uji Hipotesis

### a) Pengaruh Uji F

Uji F ini dilakukan pengujian secara normatif menggunakan pengujian satu arah yaitu untuk mengetahui ada sejauh mana variabel bebas bersama sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara simultan dan parsial dilakukan dengan membandingkan antara nilai profitabilitas dengan nilai  $\alpha$  (Priyanto, 2011) :

Jika  $P < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

Jika  $P > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima

### b) Pengaruh Uji t (t-test)

Uji t dilakukan secara normatif dengan uji dua sisi pada pernyataan  $H_o$  dan  $H_a$  hanya mengandung pertidaksamaan, yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara simultan dan parsial dilakukan dengan membandingkan antara nilai profitabilitas dengan nilai  $\alpha$  (Priyanto, 2011) :

Jika  $P < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak

Jika  $P > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Pengujian Asumsi Klasik

#### 4.1.1 Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan, yaitu uji asumsi dasar (uji normalitas), dan uji linieritas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan apakah suatu populasi data berdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 1**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.03682699
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.132
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		1.482
Asymp. Sig. (2-tailed)		.025

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* semua variabel berada di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara tidak normal.

#### 4.1.2 Uji Linieritas

##### a. Uji Linieritas

Hasil uji linearitas variabel *independent* yaitu manajemen perubahan model pendekatan terhadap variabel *dependent* menggunakan *Linearity Test*, hasil yang diperoleh diketahui bahwa ( $X_1 \rightarrow Y$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,835 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana DAK Infrastruktur Ekonomi mempunyai hubungan yang tidak linear dengan IPM. Sedangkan untuk ( $X_2 \rightarrow Y$ ) dan ( $X_3 \rightarrow Y$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,044 dan  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan masing-masing mempunyai hubungan yang linear dengan IPM.

## 4.2 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil dari uji regresi berganda sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Nilai R Square**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.391 <sup>a</sup>	.153	.132	4.08616

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai R sebesar 0,391 yang menunjukkan bahwa hubungan DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan terhadap IPM adalah cukup tinggi. Nilai *R-Square* atau koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,391 atau 39,10 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan terhadap variabel dependen IPM adalah sebesar 39,10 %. Sedangkan sisanya sebesar 60,90 % dipengaruhi (dijelaskan) oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

**Tabel 3**  
**Pengujian Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67.386	.929		72.568	.000
	X1	-1.530E-8	.000	-.130	-1.467	.145
	X2	6.882E-9	.000	.043	.513	.609
	X3	-1.573E-7	.000	-.406	-4.581	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 3 maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = -0,130 X_1 + 0,043 X_2 - 0,406 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi untuk variabel DAK Infrastruktur Ekonomi sebesar 0,130 (negatif); artinya bahwa setiap terjadi penurunan DAK Infrastruktur Ekonomi sebesar satu

satuan, maka IPM akan meningkat sebesar 0,130 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DAK Infrastruktur Ekonomi maka menurunnya IPM.

2. Koefisien regresi untuk variabel DAK Infrastruktur Kesehatan sebesar 0,043 (positif); artinya bahwa setiap terjadi peningkatan DAK Infrastruktur Kesehatan sebesar satu satuan, maka IPM akan meningkat sebesar 0,043 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DAK Infrastruktur Kesehatan maka meningkatnya IPM.
3. Koefisien regresi untuk variabel DAK Infrastruktur Pendidikan sebesar 0,406 (negatif); artinya bahwa setiap terjadi penurunan DAK Infrastruktur Pendidikan sebesar satu satuan, maka IPM akan meningkat sebesar 0,406 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DAK Infrastruktur Pendidikan maka menurunnya IPM.
4. Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan Uji Anova (Uji-F). Berdasarkan Tabel 4 (Anova), hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi 0,000. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan pengaruh terhadap IPM.

**Tabel 4**  
**Pengujian Analisis Anova (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	367.792	3	122.597	7.343	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2036.997	122	16.697		
	Total	2404.788	125			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan SPSS

Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap IPM.

### 4.3 Analisis Pengujian Asumsi Klasik LN

#### 4.3.1 Uji Normalitas LN

Uji normalitas merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan apakah suatu populasi data berdistribusi normal atau tidak. Normal atau tidaknya data dapat dilihat dari tingkat *Asymp.Sig. (2-tailed)* dalam Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov LN**

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05570068
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.044
Kolmogorov-Smirnov Z		.822
Asymp. Sig. (2-tailed)		.509

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa pada nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* semua variabel berada di diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

#### 4.3.2 Uji Linieritas LN

Hasil uji linearitas variabel *independent* yaitu manajemen perubahan model pendekatan terhadap variabel *dependent* menggunakan *Linearity Test*, hasil yang diperoleh bahwa ( $X_1 \rightarrow Y$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana DAK Infrastruktur Ekonomi mempunyai hubungan yang linear dengan IPM. Sedangkan untuk ( $X_2 \rightarrow Y$ ) dan ( $X_3 \rightarrow Y$ ) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,020 dan  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan masing-masing mempunyai hubungan yang linear dengan IPM.

#### 4.4 Uji Regresi Berganda LN

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 6**  
**Nilai R Square LN**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.524 <sup>a</sup>	.274	.256	.05638

a. Predictors: (Constant), ln\_X3, ln\_X2, ln\_X1

b. Dependent Variable: ln\_Y

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai R sebesar 0,524 yang menunjukkan bahwa hubungan DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan terhadap IPM adalah tinggi. Nilai *R-Square* atau koefisien determinasi yang

diperoleh sebesar 0,274 atau 27,40 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan terhadap variabel dependen IPM adalah sebesar 27,40 %. Sedangkan sisanya sebesar 72,60 % dipengaruhi (dijelaskan) oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

**Tabel 7**  
**Pengujian Regresi LN**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.166	.217		23.807	.000
	ln_X1	-.028	.007	-.333	-3.882	.000
	ln_X2	.006	.006	.072	.922	.358
	ln_X3	-.039	.006	-.557	-6.543	.000

a. Dependent Variable: ln\_Y

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Tabel 7 maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$\ln Y = -0,333 \ln X_1 + 0,072 \ln X_2 - 0,557 \ln X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi untuk variabel DAK Infrastruktur Ekonomi sebesar 0,333 (negatif); artinya bahwa setiap terjadi penurunan DAK Infrastruktur Ekonomi sebesar satu satuan, maka IPM akan meningkat sebesar 0,333 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DAK Infrastruktur Ekonomi maka menurunnya IPM.
2. Koefisien regresi untuk variabel DAK Infrastruktur Kesehatan sebesar 0,072 (positif); artinya bahwa setiap terjadi peningkatan DAK Infrastruktur Kesehatan sebesar satu satuan, maka IPM akan meningkat sebesar 0,072 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DAK Infrastruktur Kesehatan maka meningkatnya IPM.
3. Koefisien regresi untuk variabel DAK Infrastruktur Pendidikan sebesar 0,557 (negatif); artinya bahwa setiap terjadi penurunan DAK Infrastruktur Pendidikan sebesar satu satuan, maka IPM akan meningkat sebesar 0,557 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DAK Infrastruktur Pendidikan maka menurunnya IPM.
4. Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan Uji Anova (Uji-F). Berdasarkan Tabel 8 (Anova), hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi 0,000. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan pengaruh terhadap IPM.

**Tabel 8**  
**Pengujian Analisis Anova (Uji F) LN**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.147	3	.049	15.365	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.388	122	.003		
	Total	.534	125			

a. Predictors: (Constant), ln\_X3, ln\_X2, ln\_X1

b. Dependent Variable: ln\_Y

Sumber : Data Olahan SPSS

Hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap IPM.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh DAK Infrastruktur Ekonomi Terhadap IPM

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari DAK Infrastruktur Ekonomi (X1) terhadap IPM (Y). Berdasarkan Tabel 4.9 (*coefficients*) dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi sebesar 3,882. Dari hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam suatu daerah dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kebutuhan sarana transportasi dalam pelaksanaan kegiatan seperti distribusi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan mobilisasi dan memperlancar penyaluran barang dan jasa. Peranan infrastruktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat sangat penting terutama dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

DAK infrastruktur ekonomi di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki hubungan yang negatif dengan indek pembangunan manusia dikarenakan pembangunan infrastruktur ekonomi di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya keterbatasan anggaran, yang dimana pembangunan infrastruktur memang memerlukan penerimaan yang cukup memadai. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan, dengan perencanaan yang matang maka kegiatan yang diagendakan akan dapat berjalan dengan optimal.

#### **4.5.2 Pengaruh DAK Infrastruktur Kesehatan Terhadap IPM**

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari DAK Infrastruktur Kesehatan (X2) terhadap IPM (Y). Berdasarkan Tabel 4.9 (*coefficients*) dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi sebesar 0,922. Dari hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,358 lebih besar dari 0,05 (probabilitas > 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM.

DAK infrastruktur kesehatan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dari tahun ke tahun terlihat beberapa kegiatan yang selalu dimuat dalam juknis seperti Puskesmas, rumah dinas bagi dokter dan perawat di puskesmas, alat kesehatan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan penting untuk didanai DAK. Terdapat kegiatan-kegiatan yang lain tidak selalu dimuat dalam petunjuk teknis dimana kegiatan-kegiatan tersebut tidak menjadi prioritas pemerintah pusat karena DAK dialokasikan sesuai prioritas pemerintah pusat. Pendanaan suatau kegiatan DAK yang tidak didanai pada tahun berikutnya disebabkan karena kegiatan tersebut tidak menjadi bagian dari prioritas nasional yang akan didanai oleh DAK. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian DAK antara lain adalah puskesmas, IGD, rumah dinas. Indikator-indikator yang dapat diukur tersebut adalah indikator yang bersifat fisik/ infrastruktur. Namun demikian untuk kegiatan DAK Kesehatan yang lainnya sulit untuk diukur efektifitasnya karena kegiatan tersebut tidak dialokasikan setiap tahunnya, selain itu data-data sarana prasarana tersebut tidak semuanya tersedia dengan mudah karena sifat DAK yang bersifat pilihan. Kegiatan DAK Kesehatan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat bersifat pilihan, artinya daerah penerima dapat memilih untuk melaksanakan DAK sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

#### 4.5.3 Pengaruh DAK Infrastruktur Pendidikan Terhadap IPM

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh dari DAK Infrastruktur Pendidikan (X3) terhadap IPM (Y). Berdasarkan Tabel 4.9 (*coefficients*) dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai kesalahan prediksi sebesar 6,543. Dari hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (probabilitas < 0,05) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Pendidikan berpengaruh terhadap IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan bertujuan mengupayakan agar pada peserta didik di wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada.

DAK infrastruktur pendidikan di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki hubungan yang negatif dengan indeks pembangunan manusia dikarenakan pembangunan yang dilakukan pemerintah dilakukan dalam jangka pendek dengan terbatasnya sumber daya manusia, sehingga tidak langsung berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, ini lah yang menyebabkan DAK infrastruktur pendidikan memiliki hubungan yang negatif dengan indeks pembangunan manusia, hal ini masih dianggap cukup wajar, apalagi melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang mengalami fluktuasi atau terus menunjukkan angka pertumbuhan yang naik turun dari tahun ke tahun menunjukkan perekonomian di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat sendiri terus tumbuh setiap tahunnya, hal ini terlepas dari pengalokasian anggaran pemerintah di bidang pendidikan yang masih amat minim dan berfluktuatif setiap tahunnya.

Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya alokasi anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah mempunyai peranan sangat besar dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka pendek pengalokasian anggaran pendidikan di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat hanya memberi pengaruh jangka pendek terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan untuk pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak ada. Memang

seharunya alokasi anggaran pendidikan adalah bentuk investasi jangka panjang dalam menumbuhkan daya saing di masa depan.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DAK Infrastruktur Ekonomi berpengaruh terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan Pembangunan infrastruktur ekonomi selalu mendapat penekanan dari pemerintah di samping infrastruktur lainnya. Oleh karena ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi ini erat kaitannya dengan urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi prioritas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Ekonomi berpengaruh terhadap IPM.
2. DAK Infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan alokasi DAK Infrastruktur kesehatan masih mendapat banyak kritik karena dianggap tidak dapat menghitung secara tepat kebutuhan Infrastruktur kesehatan di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Selain kriteria infrastruktur kesehatan tidak diupdate dengan cepat sesuai dengan indikator capaian. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM.
3. DAK Infrastruktur pendidikan berpengaruh terhadap Peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan DAK Infrastruktur pendidikan yang dialokasikan pemerintah mempunyai peranan sangat besar dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, sehingga dalam jangka pendek pengalokasian anggaran pendidikan di Kabupaten/kota di Kalimantan Barat memberi pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa variabel DAK Infrastruktur Pendidikan berpengaruh terhadap IPM.

### **5.2 Rekomendasi**

Pada penelitian ini terdapat rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan, yaitu seharusnya memperhatikan sebagai berikut :

1. Dari penelitian bahwa variabel nilai DAK Infrastruktur Ekonomi dan DAK Infrastruktur Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM, sehingga untuk meningkatkan IPM di Kalimantan Barat pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan daya beli

masyarakat dengan memperbaiki perekonomian masyarakat. Selain itu peningkatan dan perbaikan sarana jalan, sarana pasar dan pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk meningkatkan IPM.

2. Dari hasil penelitian, didapat bahwa DAK Infrastruktur Kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM, sehingga hendaknya kedepannya pemerintah memperhatikan dalam pembangunan fasilitas kesehatan agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan sesuai dengan azas manfaatnya dengan demikian dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di Kalimantan Barat.
3. Berdasarkan hasil penelitian hendaknya kedepan dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia antara lain meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

### **5.3. Keterbatasan**

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian hanya sebatas faktor-faktor yang meliputi DAK Infrastruktur Ekonomi, DAK Infrastruktur Kesehatan dan DAK Infrastruktur Pendidikan yang memberikan pengaruh terhadap IPM
2. Penelitian yang dilakukan hanya melihat keterkaitan antar variabel, tetapi tidak dijelaskan secara detail untuk dapat mengimplementasikan hasil penelitian.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah". Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159.
- Adam, L. 2014. Analisis Model Kebijakan Kerja Sama Pemerinta-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur. LIPI Press. Jakarta.
- Ahada Nurfauziya. 2018. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume. 5. No 2, pp 191 - 209.
- Anak Agung Istri Agung Swandewi. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas dayana. Volume 3, No 7. Pp 356-376.

- Aolin Wang. 2017. The Impact Of Human Development On Individual Health: A Causal Mediation Analysis Examining Pathways Through Education And Body Mass Index. DOI 10.7717/peerj.3053.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- BPS Indonesia, 2019
- BPS Kalimantan Barat, 2019
- BAPPENAS and UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report. 2001. *The Economics Democracy : Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS-Statistic Indonesia.
- Geetanjali Patel. 2019. Public Education Expenditure and Its Impact on Human Resource Development in India: An Empirical Analysis. *South Asian Journal of Human*. Vol.6 No.1.
- Grigg, N. 1988, *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- Hariwijaya. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit Oryza. Jakarta.
- Harahap, R.U. 2011. Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.11 No.1.
- Human Development Report, 1990. New York. USA.
- Jehuda Jean Sanny Mongan. 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. Vol 4 No 2.
- Jeet Bahadur Sapkota. 2014. *Access to Infrastructure and Human Development: Cross-Country Evidence*. Japan International Cooperation Agency Research Institute. No 70.
- Kodoatie ,R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kuncoro. 2004. *Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Inter-governmental Fiscal Review)*, UI press, Jakarta.
- Listiorini. 2012. Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol.4 No.2. 111—126.

- Muliza. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 3, No 1. Pp 51-69
- Midgley, James. 1995. *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrusyah*. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Nadia Ayu Bhakti. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Volume 18, No 4. pp 452 – 469.
- Ndadari, LW dan Adi, PH. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2011. *Buku Saku Analisis Statistik Data*, Penerbit MediaKom. Yogyakarta.
- Putra, P.G.M. dan Ulupi, I.G.K.A. 2015. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 1, No 3*.
- Puji Lestari. 2016. Analisis Pengaruh DAU, DAK, Dan DBH Terhadap IPM Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedutahun 2012-2016. *DINAMIC : Directory Journal of Economic Vol 1 No1*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*, Vol. 8. No. 2, 2004
- Preston H. 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell, USA.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Riduwan Maulana. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di Indonesia 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*. Volume 6. No 2. pp 103-213.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian*, Edisi 7, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Siswanto, Victorianus. 2012. *Strategi dan langkah-langkah Penelitian*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suryono. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri. Malang.

Sutopo H.B.. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Universitas. Sebelas Maret Press. Surakarta.

Suliyanto. 2011, Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

United Nations Development Programme (UNDP). 1990. Global Human Development Report. Human Resources Department.

UNESCO. Human Development Report. 2007

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : Per-764/K/Su/2010.

Zulfa Eliza. 2017. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan PDRB Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 2, No. 1. pp. 44-54.

